



DJKN

KPKNL  
BOGOR



# LAPORAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN  
NEGARA DAN LELANG BOGOR

# 2023





## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                         | <b>3</b>  |
| <b>BAB I.....</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                            | <b>4</b>  |
| <b>A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI.....</b>          | <b>5</b>  |
| <b>B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....</b>          | <b>11</b> |
| 1. Pengelolaan Kekayaan Negara.....                | 11        |
| 2. Pelayanan Penilaian .....                       | 12        |
| 3. Pengurusan Piutang Negara.....                  | 13        |
| 4. Pelayanan Lelang .....                          | 13        |
| <b>BAB II.....</b>                                 | <b>14</b> |
| <b>PERENCANAAN KINERJA.....</b>                    | <b>14</b> |
| <b>A. PETA STRATEGI DAN SASARAN STRATEGIS.....</b> | <b>14</b> |
| 1. Peta Strategi.....                              | 14        |
| 2. Sasaran Strategis .....                         | 15        |
| <b>B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....</b>      | <b>16</b> |
| <b>BAB III.....</b>                                | <b>19</b> |
| <b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>                  | <b>19</b> |
| <b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....</b>          | <b>19</b> |
| <b>B. REALISASI ANGGARAN .....</b>                 | <b>27</b> |
| <b>BAB IV.....</b>                                 | <b>28</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>                               | <b>28</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                               | <b>29</b> |



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan capaian kinerja ini. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Bogor mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020.

Pada tahun 2023, KPKNL Bogor telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam kontrak kinerja KPKNL Bogor Tahun 2023 yang terdiri dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja KPKNL Bogor ini akan dibandingkan antara realisasi pencapaian IKU Tahun 2023 dengan Kontrak Kinerja Tahun 2023, serta penjelasan terkait kendala dan permasalahan yang terjadi.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, sekaligus sebagai pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan dapat dijadikan sebagai pedoman menenrukan kebijakan serta pengambilan keputusan, dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Bogor, 25 Januari 2023

Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik

Bimo Aryo

## BAB I

### PENDAHULUAN

KPKNL Bogor merupakan salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan dalam pasal 46 dan 47 menyebutkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Bogor berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 312/KMK.01/2011 terdapat 5 (lima) unsur nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis. Berkaitan dengan hal dimaksud, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor yang merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban.

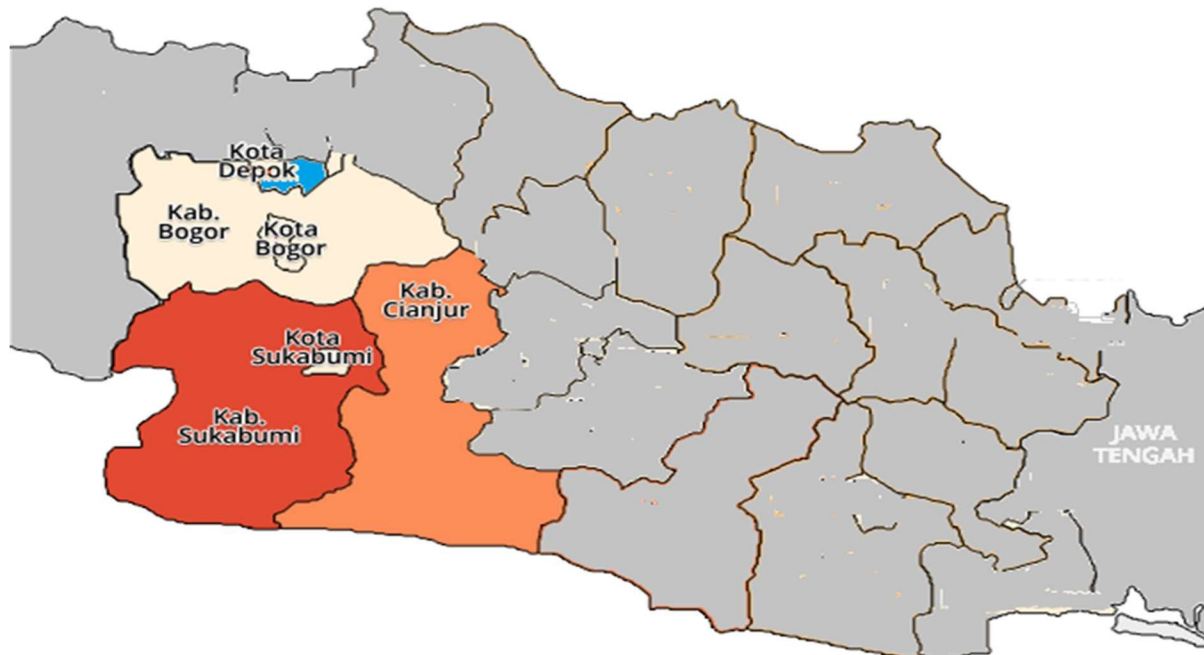
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, KPKNL Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berupaya melakukan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Melalui Laporan Kinerja KPKNL Bogor Tahun 2023 ini, masyarakat dapat menilai secara langsung apakah KPKNL Bogor telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas. Dan diharapkan masyarakat atau stakeholder dapat memberikan masukan kepada KPKNL Bogor demi perbaikan kinerja sehingga menjadi lebih baik lagi di tahun yang akan datang.

## A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor merupakan salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat. KPKNL Bogor berlokasi di jalan Veteran Nomor 45, tepat berada di pusat kota Bogor yang dikenal sebagai “Kota Hujan” dan dimasa kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama *Buitenzorg* yang berarti “tanpa kecemasan” atau “aman tentram”. Sejarah pendirian KPKNL Bogor berawal dari Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Bogor dan Kantor Lelang Negara (KLN) Bogor. Kemudian KP3N Bogor dan KLN Bogor digabung menjadi Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang (KP2LN) Bogor.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bogor memiliki wilayah kerja meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.

Gambar 1.1 Peta wilayah kerja KPKNL Bogor





Sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bogor memiliki visi dan misi yang sama, yaitu sebagai berikut.

### VISI

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

### MISI

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat;

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut, KPKNL Bogor melandasi dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu:

- **Integritas**  
Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- **Profesionalisme**  
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- **Sinergi**  
Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- **Pelayanan**



Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

- Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPKNL Bogor juga memberi motivasi dan arah kerja kepada seluruh pegawai dengan moto "**BAGEUR**" yaitu Bersih, Amanah, Gesit, Unggul, dan Ramah. Melalui moto tersebut, diharapkan setiap pegawai KPKNL Bogor dapat mengimplementasikan nilai-nilai dan budaya Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

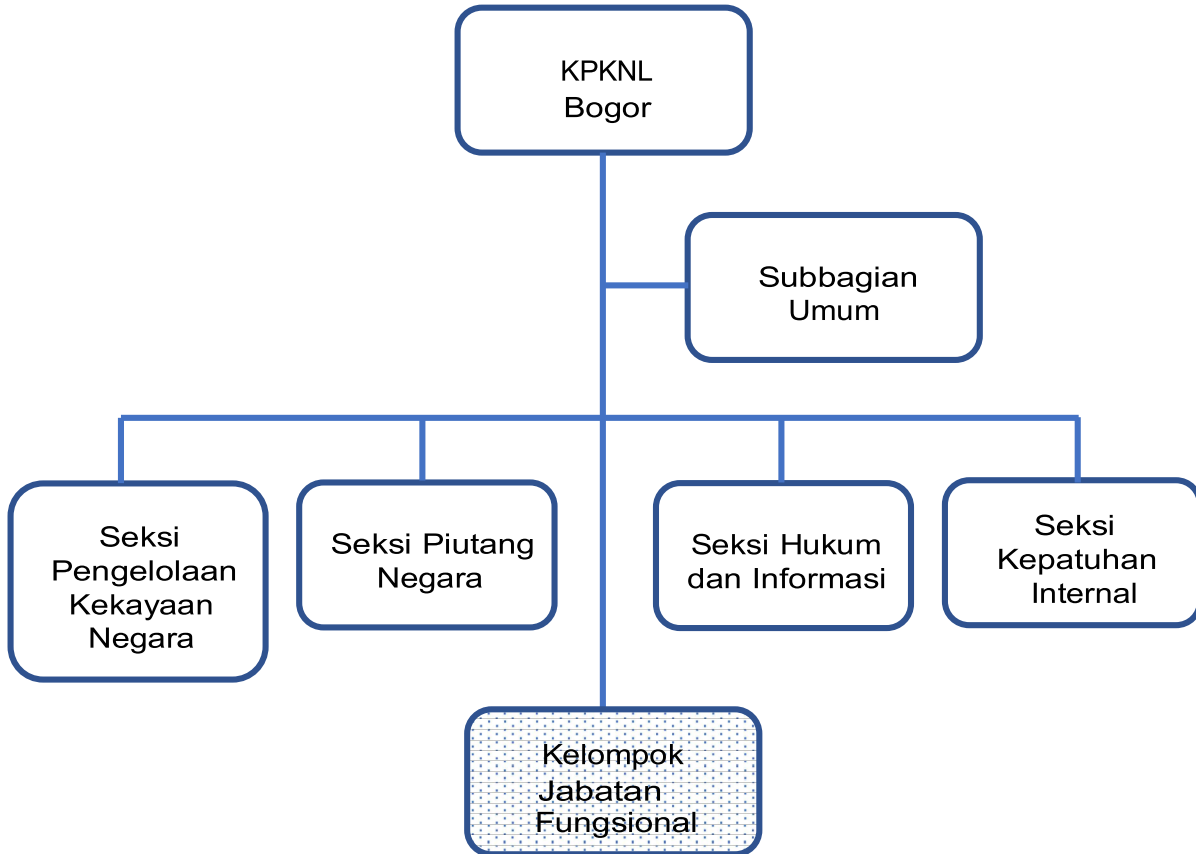
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bogor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang. Adapun fungsi KPKNL Bogor sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 yaitu:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan . negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala KPKNL Bogor dibantu oleh Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum Informasi,

Seksi Kepatuhan Internal serta Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi pada KPKNL Bogor sebagai berikut.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi KPKNL Bogor



Tugas pokok, fungsi dari setiap jabatan yang terdapat pada KPKNL Bogor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 dijelaskan sebagai berikut.

#### Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL Bogor. Formasi pegawai pada Subbagian Umum terdiri dari 1 (satu)



Kepala Subbagian, 10 (sepuluh) pegawai pelaksana, dan 14 (empat belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

#### Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara. Formasi Seksi Pengelola Kekayaan Negara terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dan 6 (enam) pegawai pelaksana.

#### Seksi Piutang Negara

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara. Formasi Seksi Piutang Negara terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dan 4 (empat) pegawai pelaksana.

#### Seksi Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, peny1apan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang. Formasi Seksi Hukum dan Informasi terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dan 5 (lima) pegawai pelaksana.

#### Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Formasi Seksi Kepatuhan Internal terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dan 3 (tiga) pegawai pelaksana.



### Kelompok Jabatan Fungsional

Pada KPKNL Bogor terdapat kelompok jabatan fungsional yang dibentuk sesuai kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi KPKNL Bogor sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan melalui proses pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Formasi Kelompok Jabatan Fungsional pada KPKNL Bogor terdiri dari 1 (satu) Pelelang Ahli Madya, 5 (lima) Pelelang Ahli Muda, 4 (empat) Pelelang Ahli Pertama, 2 (dua) Penilai Pemerintah Ahli Muda, 4 (empat) Penilai Pemerintah Ahli Pertama, dan 1 (satu) Pranata Keuangan APBN Terampil.

Jumlah pegawai KPKNL Bogor pada 31 Desember 2023 adalah adalah 65 Pegawai yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Kantor, 5 (lima) Kepala Seksi, 16 (enam belas) Pejabat Fungsional Ahli, 1 (satu) Pejabat Fungsional Terampil, 28 Pegawai Pelaksana, dan 14 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, KPKNL Bogor mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan secara konsisten dengan berpedoman pada standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam:

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
4. Keputusan Menteri keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen keuangan.

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, KPKNL Bogor menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan perubahan besar terhadap tata kelola keuangan negara yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan, dengan dilandasi oleh tiga paket undang undang di bidang keuangan negara, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

## B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai salah satu unit vertikal DJKN, KPKNL Bogor mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang. Pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Bogor tidak hanya kepada stakeholder instansi pemerintah namun juga melayani masyarakat umum, misalnya dalam pelayanan di bidang lelang dan piutang negara. Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh KPKNL Bogor selalu diupayakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Peran strategis KPKNL Bogor dalam melakukan pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang secara garis besar terurai di bawah ini.

### 1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Dalam melakukan pengelolaan kekayaan Negara, KPKNL Bogor mempunyai tugas inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara serta registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara. Pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan:

- Menghilangkan *high operational cost*.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan kekayaan negara.
- Mengharmonisasikan ketentuan perundangan kekayaan negara antar sektor.
- Mengetahui jumlah, keberadaan dan besaran nilai riil kekayaan negara.
- Tersusunnya Neraca Kekayaan Pemerintah dan Neraca Kekayaan Negara.
- Optimalisasi pemanfaatan kekayaan negara.
- Mengatur pengurusan terhadap kekayaan negara, baik yang existing maupun disposal.
- Menghindari dispute antara instansi/unit pengelola kekayaan negara.

Salah satu lingkup pengelolaan kekayaan negara yaitu pengelolaan Barang Milik Negara. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya sah. Dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kapastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Pengelolaan Barang Milik Negara memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan. Proses pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Satuan Kerja (Satker) yang berasal dari Kementerian/Lembaga yang merupakan mitra kerja KPKNL Bogor ada sebanyak 443 (empat ratus empat puluh tiga) Satker.

## 2. Pelayanan Penilaian

Pelayanan Penilaian pada tahun 2023 dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap:

- a. Barang Milik Negara;
- b. barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain, dalam rangka pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal;
- c. kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara atau perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara;
- d. kekayaan negara lain-lain, dalam rangka pengelolaan kekayaan negara lain-lain;
- e. barang yang akan ditetapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara;
- f. penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara.

Penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah tersebut dilakukan dalam rangka:

- a. keperluan lelang sitaan pajak;
- b. keperluan lelang barang-barang eks tegahan kepabeanan dan cukai;
- c. pengelolaan Barang Milik Daerah dan/atau kekayaan daerah;
- d. pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara;
- e. pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah;
- f. pengelolaan aset lembaga atau badan hukum non swasta lainnya; atau



- g. pengelolaan aset sitaan Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan penilaian, Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dalam akan menggunakan analisis sesuai dengan prinsip penggunaan tertinggi dan terbaik (*The Highest and The Best Use*), analisis kelayakan bisnis dan analisis pasar properti, sehingga Penilai DJKN menghasilkan nilai yang akurat dan akuntabel. Dari uraian tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Penilai DJKN mempunyai peran yang strategis dalam mendukung Pengelolaan Kekayaan Negara yang akuntabel.

### 3. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang negara mempunyai peran strategis untuk melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Peran ini sangat mendukung peran strategis DJKN sebagai revenue center dari sisi biaya administrasi pengurusan piutang negara.

### 4. Pelayanan Lelang

Lelang merupakan penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum. Penjualan melalui lelang memberikan keuntungan bagi pihak masyarakat, instansi-instansi yang membutuhkan yang mungkin berbeda dari sisi keperluan maupun pemerintah. Bagi masyarakat penjualan melalui lelang memberikan jaminan kepastian hukum atas barang-barang yang dibeli serta mendapatkan transaksi yang transparan dan efisien. Bagi instansi atau badan-badan usaha yang dilayani memberikan media untuk mendapatkan dana dalam waktu yang relatif cepat dengan harga yang maksimal, dengan tersedianya dana maka akan memperlancar arus lalu lintas perekonomian negara. Di samping itu, bagi pemerintah, lelang juga memiliki fungsi budgeter untuk mengumpulkan penerimaan negara khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk bea lelang, PPh dan BPHTB guna membiayai tugas-tugas pemerintah dan pembangunan. Dengan demikian, pelayanan lelang mempunyai peranan yang sangat strategis karena merupakan salah satu sumber dari penerimaan negara.

## BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

## A. PETA STRATEGI DAN SASARAN STRATEGIS

## 1. Peta Strategi

Perencanaan kinerja KPKNL Bogor dituangkan dalam bentuk Kontrak Kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat dan Kepala KPKNL Bogor. Penandatanganan Kontrak Kinerja merupakan cerminan dari kesanggupan untuk meraih dan melampaui target yang telah ditetapkan serta menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan KPKNL Bogor sebagai dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir tahun.

Gambar 2.1 Peta Strategi KPKNL Bogor



Peta strategi KPKNL Bogor terdiri dari 4 (empat) perspective yaitu:

1) *Stakeholder Perspective*

*Prespective* yang berkaitan dengan stakeholder KPKNL Bogor dan untuk mengetahui kinerja KPKNL Bogor yang paling utama/pokok. *Stakeholder prespective* terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal.

## 2) *Customer Perspective*

*Perspective* yang berorientasi kepada pelanggan atau pengguna jasa KPKNL Bogor adalah dalam rangka memenuhi keinginan atau kebutuhan pengguna jasa. *Customer perspective* terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu kepuasan pengguna layanan dan kepatuhan yang tinggi atas Peraturan Pengelolaan Kekayaan Negara. Pelanggan atau pengguna jasa KPKNL Bogor yaitu Satuan Kerja K/L, Penyerah Piutang, Pemohon Lelang dan Pembeli Lelang.

## 3) *Internal Process Perspective*

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mendukung pemberian layanan kepada *customer* dan *stakeholder*. *Internal process perspective* terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis yaitu pelayanan yang berkualitas, penatausahaan dan pengamanan kekayaan negara yang akuntabel, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang optimal, edukasi yang efektif, pengawasan dan pengendalian yang efektif.

## 4) *Learning and Growth Perspective*

Merupakan sumber daya internal KPKNL Bogor yang dimiliki sebagai modal untuk untuk melaksanakan kegiatan organisasi. *Learning and growth perspective* terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu SDM yang kompetitif, organisasi yang kondusif, sistem manajemen informasi yang andal, dan pengelolaan anggaran yang optimal.

Kontrak Kinerja Kemenkeu Three KPKNL Bogor Tahun 2022 terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS), 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

## 2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi. Adapun Sasaran Strategis Kemenkeu *Three* KPKNL Bogor berjumlah 10 (sepuluh), yaitu:

- 1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan
- 2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.
- 3) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal
- 4) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif
- 5) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
- 6) Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif
- 7) Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif
- 8) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal

9) Organisasi yang *fit-for-purpose*

10)Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut di atas, telah ditetapkan indikator atau tolak ukur keberhasilan pencapaiannya yaitu berupa Indikator Kinerja utama (IKU). IKU Kemenkeu Three KPKNL Bogor yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Antara Sasaran Strategis dengan IKU terdapat keterkaitannya, yaitu sebagaimana disajikan dalam bagan di bawah ini.

Tabel 2.1 Daftar IKU KPKNL Bogor Tahun 2023

| Kode SS/IKU | SS dan IKU  | Target |     |        |     |         |      |      |
|-------------|---|--------|-----|--------|-----|---------|------|------|
|             |   | Q1     | Q2  | Smt. 1 | Q3  | s.d. Q3 | Q4   | Y    |
| 1           | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan |        |     |        |     |         |      |      |
| 1a-CP       | Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang                      | 10%    | 30% | 30%    | 60% | 60%     | 100% | 100% |
| 1b-CP       | Persentase produktivitas lelang   | 30%    | 45% | 45%    | 60% | 60%     | 80%  | 80%  |
| 2           | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa                              |        |     |        |     |         |      |      |
| 2a-CP       | Persentase Realisasi Pokok Lelang   | 20%    | 40% | 40%    | 70% | 70%     | 100% | 100% |
| 2b-CP       | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara   | 10%    | 30% | 30%    | 60% | 60%     | 100% | 100% |
| 3           | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal   |        |     |        |     |         |      |      |
| 3a-CP       | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK   | -      | 50  | 50     | 55  | 55      | 68   | 68   |



|       |  |     |     |     |     |     |      |      |
|-------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 3b-CP | Persentase BMN Beupa Tanah yang Disertipikatkan                                  | -   | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 3c-CP | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)                       | 10% | 30% | 30% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| 3d-CP | Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)   | 12% | 32% | 32% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 4     | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif                     |     |     |     |     |     |      |      |
| 4a-CP | Persentase Pelaksanaan lelang E-Auction dan EConventional Auction                | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94%  | 94%  |
| 4b-CP | Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online                                  | 20% | 40% | 40% | 63% | 63% | 86%  | 86%  |
| 4c-CP | Deviasi Data PNBPFungsional DJKN   | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%  | 15%  |
| 5     | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional                             |     |     |     |     |     |      |      |
| 5a-CP | Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian  | 25% | 25% | 25% | 25% | 19% | 19%  | 19%  |
| 5b-CP | Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70   | 70   |
| 6     | Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif                         |     |     |     |     |     |      |      |
| 6a-CP | Tingkat Efektifitas Tindakanlanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara   | -   | 50% | 50% | 50% | 50% | 86%  | 86%  |
| 7     | Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif |     |     |     |     |     |      |      |
| 7a-N  | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai                                       | 15% | 40% | 40% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 8     | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal                              |     |     |     |     |     |      |      |



|        |  |      |      |      |      |      |       |       |
|--------|--|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 8a-CP  | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran                 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5  | 95,5  |
| 9      | Organisasi yang fit-for-purpose                              |      |      |      |      |      |       |       |
| 9a-N   | Persentase Rekomendasi Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti | -    | -    | -    | -    | -    | 97%   | 97%   |
| 9b-N   | Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM      | -    | -    | -    | -    | -    | 100   | 100   |
| 10     | Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif      |      |      |      |      |      |       |       |
| 10a-CP | Indeks Integritas Organisasi                                 | -    | -    | -    | -    | -    | 88,67 | 88,67 |
| 10b-CP | Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP                        |      |      |      |      |      | 60    | 60    |

## BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Perbandingan antara target IKU dengan realisasi IKU pada masing-masing perspektif diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bogor tahun 2023 adalah sebesar 113,13% (seratus tiga belas koma lima dua persen).

Kinerja KPKNL Bogor tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini nampak adanya peningkatan NKO dari 110,23% (tahun 2022) menjadi 113,13% (tahun 2023). Selama tahun 2023, KPKNL Bogor memiliki 20 (dua puluh) IKU dan pada akhir tahun seluruh IKU status hijau.

Secara keseluruhan, Capaian Kinerja IKU Kemenkeu-Three KPKNL Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian IKU KPKNL Bogor Tahun 2022

| Seksi PKN, PN dan JF Pelelang | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan |         |         |         |         |         |         |        |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                               | Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang                      |         |         |         |         |         |         |        |
| T/R                           | Q1  | Q2      | SM. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | PoI/KP |
| Target                        | 10%   | 30%     | 30%     | 60%     | 60%     | 100%    | 100%    |        |
| Realisasi                     | 21,35%  | 44,18%  | 44,18%  | 78,88%  | 78,88%  | 120,92% | 120,92% |        |
| Capaian                       | 130,32%   | 147,28% | 147,28% | 131,46% | 131,46% | 120,92% | 120,92% |        |

| Isu Utama dan Implikasi       |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Target                        |                                      |
| PKN                           | : Rp 24.000.000.000                  |
| PN                            | : Rp 25.100.000                      |
| Lelang                        | : Rp 31.173.000.000                  |
| Realisasi                     |                                      |
| PKN                           | : Rp 34.332.969.149                  |
| PN                            | : Rp 107.235.241                     |
| Lelang                        | : Rp 32.302.952.983                  |
| <b>Total Realisasi PNBPNP</b> | <b>: Rp 66.743.157.373 (120,92%)</b> |

| Jafung Pelelang | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan |         |         |         |         |         |         |        |
|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                 | Persentase Produktivitas Lelang   |         |         |         |         |         |         |        |
| T/R             | Q1  | Q2      | SM. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | PoI/KP |
| Target          | 30%   | 45%     | 45%     | 60%     | 60%     | 80%     | 80%     |        |
| Realisasi       | 87,14%  | 89,69%  | 89,69%  | 107,68% | 107,68% | 128,47% | 128,47% |        |
| Capaian         | 290,47%   | 199,31% | 199,31% | 178,47% | 178,47% | 160,59% | 160,59% |        |

**Isu Utama dan Implikasi**

Realisasi Produktivitas lelang s.d. Desember 2023 adalah sebesar 128,47%

| Jafung Pelelang | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa |        |        |        |         |         |         |        |
|-----------------|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
|                 | Persentase Realisasi Pokok Lelang  |        |        |        |         |         |         |        |
| T/R             | Q1   | Q2     | SM. I  | Q3     | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/KP |
| Target          | 20%  | 40%    | 40%    | 70%    | 70%     | 100%    | 100%    |        |
| Realisasi       | 21,33%   | 36,22% | 36,22% | 60,29% | 60,29%  | 101,85% | 101,85% |        |
| Capaian         | 106,64%  | 90,44% | 90,44% | 86,14% | 86,14%  | 101,85% | 101,85% |        |

**Isu Utama dan Implikasi**

Target : 100%

PL Kelas I : Rp 701.669.000.000

Pegadaian : Rp 202.150.000.000

Jumlah target : Rp 903.819.000.000

Realisasi :

PL Kelas I : Rp 652.234.915.131

Pegadaian : Rp 268.302.079.700

Jumlah realisasi : Rp 920.536.994.831 (101,85%)

| Seksi PN  | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa |          |          |         |         |         |         |        |
|-----------|--|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|
|           | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara                            |          |          |         |         |         |         |        |
| T/R       | Q1   | Q2       | SM. I    | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/KP |
| Target    | 10%  | 30%      | 30%      | 60%     | 60%     | 100%    | 100%    |        |
| Realisasi | 151,83%  | 345,33%  | 345,33%  | 111,14% | 111,14% | 117,12% | 117,12% |        |
| Capaian   | 1518,27%   | 1151,10% | 1151,10% | 185,23% | 185,23% | 117,12% | 117,12% |        |

**Isu Utama dan Implikasi**

Target : 100%

Rp 5.250.000.000 (setelah adendum raw data)

Target sebelumnya : Rp 4.750.000.000 (Tw.III)

Rp 1.000.000.000 (Tw. I)

Realisasi : Rp 6.148.769.216 (117,12%)

| Seksi PKN | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal                                      |         |         |         |         |         |         |        |
|-----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|           | Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan |         |         |         |         |         |         |        |
| T/R       | Q1  | Q2      | SM. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/KP |
| Target    | -   | 50%     | 50%     | 55%     | 55%     | 68%     | 68%     |        |
| Realisasi | -   | 70,40%  | 70,40%  | 72,07%  | 72,07%  | 73,17%  | 73,17%  |        |
| Capaian   | -   | 140,80% | 140,80% | 131,04% | 131,04% | 107,60% | 107,60% |        |

**Isu Utama dan Implikasi**

Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan adalah 73,17%



| Seksi PKN | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal                         |        |        |         |         |         |         |        |
|-----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
|           | Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan |        |        |         |         |         |         |        |
| T/R       | Q1   | Q2     | SM. I  | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/KP |
| Target    |  | 40%    | 40%    | 60%     | 60%     | 100%    | 100%    |        |
| Realisasi |  | 7,45%  | 7,45%  | 73,23%  | 73,23%  | 171,24% | 171,24% |        |
| Capaian   |  | 18,62% | 18,62% | 122,05% | 122,05% | 171,24% | 171,24% |        |

| Isu Utama dan Implikasi  |
|--|
| <p><b>Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan</b></p> <p>Target : 100%<br/>1.356 bidang</p> <p>Realisasi : 171,24%<br/>2.322 bidang</p> |

| Seksi PN  | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal                   |         |         |         |         |      |      |        |
|-----------|--|---------|---------|---------|---------|------|------|--------|
|           | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) |         |         |         |         |      |      |        |
| T/R       | Q1   | Q2      | SM. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4   | Y-23 | Pol/KP |
| Target    | 10%  | 30%     | 30%     | 60%     | 60%     | 100% | 100% |        |
| Realisasi | 32,74%   | 64,60%  | 64,60%  | 85,83%  | 85,83%  | 105% | 105% |        |
| Capaian   | 327,43%  | 175,03% | 175,03% | 143,06% | 143,06% | 105% | 105% |        |

| Isu Utama dan Implikasi   |
|---|
| <p>Target : 100%<br/>120 BKPN (setelah addendum raw data)</p> <p>Target : 120 BKPN</p> <p>Realisasi : 105%<br/>126 BKPN</p> |

| Seksi PKN | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal |         |         |         |         |         |         |        |
|-----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|           | Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)   |         |         |         |         |         |         |        |
| T/R       | Q1                                       | Q2      | SM. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/KP |
| Target    | 12%                                      | 32%     | 32%     | 75%     | 75%     | 100%    | 100%    |        |
| Realisasi | 41%                                      | 117,54% | 117,54% | 96,95%  | 96,95%  | 133,40% | 133,40% |        |
| Capaian   | 344,83%                                  | 367,30% | 367,30% | 129,26% | 129,26% | 133,40% | 133,40% |        |

| Isu Utama dan Implikasi  |   |    |   |    |                                |         |  |         |
|--|---|----|---|----|--------------------------------|---------|--|---------|
| <p><b>Realisasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) :</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Jumlah Aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti satker</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Aset/Jumlah Target Aset</td> <td>131,03%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Rekomendasi/Jumlah Target Rekomendasi</td> <td>142,86%</td> </tr> </table> | Jumlah Aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya | 38 | Jumlah Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti satker | 10 | Jumlah Aset/Jumlah Target Aset | 131,03% | Jumlah Rekomendasi/Jumlah Target Rekomendasi | 142,86% |
| Jumlah Aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya  | 38  |    |   |    |                                |         |  |         |
| Jumlah Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti satker  | 10  |    |   |    |                                |         |  |         |
| Jumlah Aset/Jumlah Target Aset   | 131,03%   |    |   |    |                                |         |  |         |
| Jumlah Rekomendasi/Jumlah Target Rekomendasi   | 142,86%   |    |   |    |                                |         |  |         |



| Jafung Pelelang | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif       |         |         |         |         |         |         |        |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                 | Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction |         |         |         |         |         |         |        |
| T/R             | Q1   | Q2      | SM. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/KP |
| Target          | 94%  | 94%     | 94%     | 94%     | 94%     | 94%     | 94%     |        |
| Realisasi       | 100%   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |        |
| Capaian         | 106,38%  | 106,38% | 106,38% | 106,38% | 106,38% | 106,38% | 106,38% |        |

| Isu Utama dan Implikasi  |
|--------------------------|
| Target : 94%             |
| Realisasi : 100%         |
| Jumlah Frekuensi : 2.878 |

| Jafung Pelelang | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif |      |       |         |         |         |         |        |
|-----------------|--|------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                 | Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online              |      |       |         |         |         |         |        |
| T/R             | Q1   | Q2   | SM. I | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/KP |
| Target          | 20%  | 40%  | 40%   | 63%     | 63%     | 86%     | 86%     |        |
| Realisasi       | 100%   | 100% | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |        |
| Capaian         | 500%   | 250% | 250%  | 106,38% | 106,38% | 116.28% | 116.28% |        |

| Isu Utama dan Implikasi                         |
|---|
| Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online |
| Jumlah permohonan lelang online: 4.913          |

| Subbag Umum dan Seksi HI | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif |      |       |      |         |      |      |        |
|--------------------------|--|------|-------|------|---------|------|------|--------|
|                          | Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN                            |      |       |      |         |      |      |        |
| T/R                      | Q1   | Q2   | SM. I | Q3   | s.d. Q3 | Q4   | Y-23 | Pol/KP |
| Target                   | 15%  | 15%  | 15%   | 15%  | 15%     | 15%  | 15%  |        |
| Realisasi                | 0%   | 0%   | 0%    | 0%   | 0%      | 0%   | 0%   |        |
| Capaian                  | 200%   | 200% | 200%  | 200% | 200%    | 200% | 200% |        |

| Isu Utama dan Implikasi |
|-------------------------|
| Target : 15%            |
| Realisasi : 0%          |

| Jafung Penilai Pemerintah | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional |      |       |      |         |      |      |        |
|---------------------------|--|------|-------|------|---------|------|------|--------|
|                           | Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian                  |      |       |      |         |      |      |        |
| T/R                       | Q1   | Q2   | SM. I | Q3   | s.d. Q3 | Q4   | Y-23 | Pol/KP |
| Target                    | 25%  | 25%  | 25%   | 25%  | 25%     | 25%  | 25%  |        |
| Realisasi                 | 0%   | 0%   | 0%    | 0%   | 0%      | 0%   | 0%   |        |
| Capaian                   | 200%   | 200% | 200%  | 200% | 200%    | 200% | 200% |        |

| Isu Utama dan Implikasi                            |
|--|
| Realisasi Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian : 0% |



| Jafung Penilai Pemerintah | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional                            |         |         |         |         |         |         |        |
|---------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                           | Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien |         |         |         |         |         |         |        |
| T/R                       | Q1  | Q2      | SM. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/KP |
| Target                    | 70  | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      |        |
| Realisasi                 | 95,88   | 93,04   | 93,04   | 89,29   | 89,29   | 90,46   | 90,46   |        |
| Capaian                   | 136,97%   | 123,31% | 123,31% | 127,55% | 127,55% | 129,23% | 129,23% |        |

| Isu Utama dan Implikasi  |
|--|
| Realisasi Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien adalah sebesar 90,46 |

| Seksi PKN | Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif                      |         |         |         |         |         |         |        |
|-----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|           | Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara |         |         |         |         |         |         |        |
| T/R       | Q1  | Q2      | SM. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/KP |
| Target    | -   | 50%     | 50%     | 50%     | 50%     | 86%     | 86%     |        |
| Realisasi | -   | 55,80%  | 55,80%  | 76,43%  | 76,43%  | 91,43%  | 91,43%  |        |
| Capaian   | -   | 115,59% | 115,59% | 152,86% | 152,86% | 106,31% | 106,31% |        |

| Isu Utama dan Implikasi   |  |    |   |    |   |    |  |    |
|---|--|----|---|----|---|----|--|----|
| Realisasi sampai Desember 2023 adalah 91,43%  |  |    |   |    |   |    |  |    |
| <table border="1"> <tr> <td>Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023</td> <td>77</td> </tr> </table> | Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN | 58 | Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN | 70 | Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022 | 63 | Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023 | 77 |
| Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN  | 58   |    |   |    |   |    |  |    |
| Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN   | 70   |    |   |    |   |    |  |    |
| Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022   | 63   |    |   |    |   |    |  |    |
| Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023  | 77   |    |   |    |   |    |  |    |

| Subbagian Umum | Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif |         |         |         |         |      |      |        |
|----------------|--|---------|---------|---------|---------|------|------|--------|
|                | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai                                       |         |         |         |         |      |      |        |
| T/R            | Q1   | Q2      | SM. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4   | Y-23 | Pol/KP |
| Target         | 15%  | 40%     | 40%     | 75%     | 75%     | 100% | 100% |        |
| Realisasi      | 86,09%   | 114,78% | 114,78% | 114,89% | 114,89% | 115% | 115% |        |
| Capaian        | 231,11%  | 286,96% | 286,96% | 153,19% | 153,19% | 115% | 115% |        |

| Isu Utama dan Implikasi  |
|--|
| Pegawai yang telah mengikuti diklat lebih 30 JP : 46 orang dari total 48 orang Pegawai |

| Nama Unit | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal |         |         |         |         |         |         |        |
|-----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|           | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran        |         |         |         |         |         |         |        |
| T/R       | Q1  | Q2      | SM. I   | Q3      | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/KP |
| Target    | 95,5%   | 95,5%   | 95,5%   | 95,5%   | 95,5%   | 100     | 100     |        |
| Realisasi | 114,6%  | 114,60% | 114,60% | 114,60% | 114,60% | 116,02  | 116,02  |        |
| Capaian   | 120%  | 120%    | 120%    | 120%    | 120%    | 116,02% | 116,02% |        |

| Isu Utama dan Implikasi                           |
|---|
| Hasil realisasi bulan Desember 2023 adalah 116,02 |



| Nama Unit | Organisasi yang fit-for-purpose                                    |    |       |    |         |         |         |        |
|-----------|--|----|-------|----|---------|---------|---------|--------|
|           | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti |    |       |    |         |         |         |        |
| T/R       | Q1   | Q2 | SM. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/KP |
| Target    |  |    |       |    |         | 97%     | 97%     |        |
| Realisasi |  |    |       |    |         | 100%    | 100%    |        |
| Capaian   |  |    |       |    |         | 103,09% | 103,09% |        |

| Isu Utama dan Implikasi  |
|--|
| Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan tuntas oleh Itjen Kemenkeu |

| KPKNL Bogor | Organisasi yang fit-for-purpose                         |    |       |    |         |      |      |        |
|-------------|---|----|-------|----|---------|------|------|--------|
|             | Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM |    |       |    |         |      |      |        |
| T/R         | Q1  | Q2 | SM. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4   | Y-23 | Pol/KP |
| Target      |   |    |       |    |         | 100  | 100  |        |
| Realisasi   |   |    |       |    |         | 100  | 100  |        |
| Capaian     |   |    |       |    |         | 100% | 100% |        |

| Isu Utama dan Implikasi                                |
|--|
| KPKNL Bogor berhasil memperoleh Predikat menuju ZI-WBK |

| Seksi KI  | Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif |    |       |    |         |         |         |        |
|-----------|---|----|-------|----|---------|---------|---------|--------|
|           | Indeks Integritas Organisasi                            |    |       |    |         |         |         |        |
| T/R       | Q1  | Q2 | SM. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/KP |
| Target    |   |    |       |    |         | 88,67   | 88,67   |        |
| Realisasi |   |    |       |    |         | 89,17   | 89,17   |        |
| Capaian   |   |    |       |    |         | 100,56% | 100,56% |        |

| Isu Utama dan Implikasi |
|-------------------------|
| -                       |

| Seksi KI  | Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif |    |       |    |         |         |         |        |
|-----------|---|----|-------|----|---------|---------|---------|--------|
|           | Indeks Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif  |    |       |    |         |         |         |        |
| T/R       | Q1  | Q2 | SM. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4      | Y-23    | Pol/KP |
| Target    |   |    |       |    |         | 60      | 60      |        |
| Realisasi |   |    |       |    |         | 97,10   | 97,10   |        |
| Capaian   |   |    |       |    |         | 161,83% | 161,83% |        |

| Isu Utama dan Implikasi |
|-------------------------|
| -                       |

Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

| Kode SS/IKU | SS dan IKU  | Realisasi |      |      |
|-------------|---|-----------|------|------|
|             |   | 2023      | 2022 | 2021 |
| 1           | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan |           |      |      |
| 1a-CP       | Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang                      | 120,92%   | 139% | 113% |
| 1b-CP       | Persentase produktivitas lelang   | 128,47%   | 32%  | 29%  |
| 2           | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa                              |           |      |      |
| 2a-CP       | Persentase Realisasi Pokok Lelang   | 101,85%   | 142% | 144% |
| 2b-CP       | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara   | 117,12%   | 230% | 171% |
| 3           | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal   |           |      |      |
| 3a-CP       | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK   | 73,17%    | 78%  | 66%  |
| 3b-CP       | Persentase BMN Beupa Tanah yang Disertipikatkan   | 171,24%   | 141% | 102% |
| 3c-CP       | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)  | 105%      | 143% | 26%  |
| 3d-CP       | Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)  | 133,40%   | 103% | 102% |
| 4           | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif  |           |      |      |
| 4a-CP       | Persentase Pelaksanaan lelang E-Auction dan E-Conventional Auction                                      | 100%      | 100% | 100% |
| 4b-CP       | Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online   | 90,46     | -    | -    |
| 4c-CP       | Deviasi Data PNBP   | 0%        | 0%   | 100% |



|        |  |         |        |        |
|--------|--|---------|--------|--------|
|        | Fungsional DJKN  |         |        |        |
| 5      | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional                             |         |        |        |
| 5a-CP  | Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian  | 0%      | 0,40%  | 0%     |
| 5b-CP  | Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien  | 89,29   | 70     | -      |
| 6      | Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif                         |         |        |        |
| 6a-CP  | Tingkat Efektifitas Tindakanlanjutan Pengelolaan Barang Milik Negara             | 106,31% | 85%    | 97%    |
| 7      | Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif |         |        |        |
| 7a-N   | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai                                       | 115%    | 114%   | 111%   |
| 8      | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal                              |         |        |        |
| 8a-CP  | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran                                     | 116,02% | 95,87% | 94,93% |
| 9      | Organisasi yang fit-for-purpose  |         |        |        |
| 9a-N   | Persentase Rekomendasi Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti                     | 100%    | 100%   | 100%   |
| 9b-N   | Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM                          | 100     | -      | -      |
| 10     | Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif                          |         |        |        |
| 10a-CP | Indeks Integritas Organisasi   | 89,17   | -      | -      |
| 10b-CP | Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP  | 97,10   | -      | -      |



## B. REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023 KPKNL Bogor mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 3.837.964.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebagai berikut:

| Kegiatan        | Pagu                 | Realisasi            | Presentase   |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Belanja Barang  | 2.910.252.000        | 2.605.399.275        | 89,52        |
| Belanja Modal   | 927.712.000          | 893.522.112          | 96,31        |
| Belanja Pegawai | -                    | -                    | -            |
| <b>Total</b>    | <b>3.837.964.000</b> | <b>3.498.921.387</b> | <b>91,17</b> |

\*) Sumber data realisasi tersebut diambil dari aplikasi Sistem Aplikasi Satker (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara).

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tingkat pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) BOGOR pada tahun 2023 secara umum dapat dikatakan sangat baik dengan capaian kinerja keseluruhan (Nilai Kinerja Organisasi/NKO) sebesar 113,13% dengan katagori sangat baik.

Tabel 4.1 Capaian KPKNL Bogor Tahun 2023

| Perspective         | Bobot   | Nilai  |
|---------------------|---------|--------|
| Stakeholder         | 25%     | 33,64% |
| Customer            | 15%     | 21,90% |
| Internal Process    | 30%     | 29,18% |
| Learning end Growth | 30%     | 28,41% |
| NKO                 | 113,13% |        |

Dalam mencapai target kinerja, KPKNL Bogor menghadapi banyak tantangan, kendala dan permasalahan. Hal tersebut dapat dilalui dengan segala upaya dan rencana aksi yang telah dilaksanakan sehingga realisasi capaian kinerja dapat melampaui targetnya. KPKNL Bogor juga berhasil memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan selama tahun 2023.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun dan semoga dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholder* KPKNL Bogor. Saran, kritik, dan masukan yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja KPKNL Bogor di masa yang akan datang. Pada akhirnya, KPKNL Bogor belum berpuas diri atas capaian yang sudah ada dan akan terus berusaha melakukan upaya perbaikan diri terutama dalam hal peningkatan pelayanan terhadap *stakeholder*.



## LAMPIRAN

### Daftar Penghargaan yang diraih KPKNL Bogor pada tahun 2023

|    |  |                                 |                                      |
|----|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Pelelang Ahli Pertama Terbaik pada Zona I                                    | DJKN                            | April Mopsan Hutabarat / KPKNL Bogor |
| 2  | Pelelang Ahli Madya Terbaik  | DJKN                            | Palomes / KPKNL Bogor                |
| 3  | Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)               | Menkeu (Kolaborasi dengan TPN)  | KPKNL Bogor                          |
| 4  | Peringkat Pertama IKPA Terbaik Periode Tahun 2022                            | KPPN Bogor                      | KPKNL Bogor                          |
| 5  | Peringkat Pertama IKPA Terbaik Periode Semester 1 Tahun 2023                 | KPPN Bogor                      | KPKNL Bogor                          |
| 6  | Satker dengan Pencapaian IKPA Sempurna Nilai 100 pada Semester 2 Tahun 2022  | Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat | KPKNL Bogor                          |
| 7  | Satker dengan Pencapaian IKPA Sempurna Nilai 100 pada Semester 1 Tahun 2023  | Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat | KPKNL Bogor                          |
| 8  | Penilaian Barang Milik Daerah  | Walikota Bogor                  | KPKNL Bogor                          |
| 9  | Operator pada KPKNL Bogor sebagai Pemegang User SAKTI Paling Responsif       | KPPN Bogor                      | Ridwan / KPKNL Bogor                 |
| 10 | Terbaik ke-II Kategori Percepatan LPJ Bendahara                              | KPPN Bogor                      | KPKNL Bogor                          |
| 11 | Pelayanan Lelang yang Excellent kepada PT Bank Mandiri selama tahun 2022     | Bank Mandiri                    | KPKNL Bogor                          |
| 12 | Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda                              | DJKN                            | Fahdrian Kemala/KPKNL Bogor          |
| 13 | Pelayanan Lelang yang Excellent kepada PT Bank Mandiri semester I Tahun 2023 | Bank Mandiri                    | KPKNL Bogor                          |



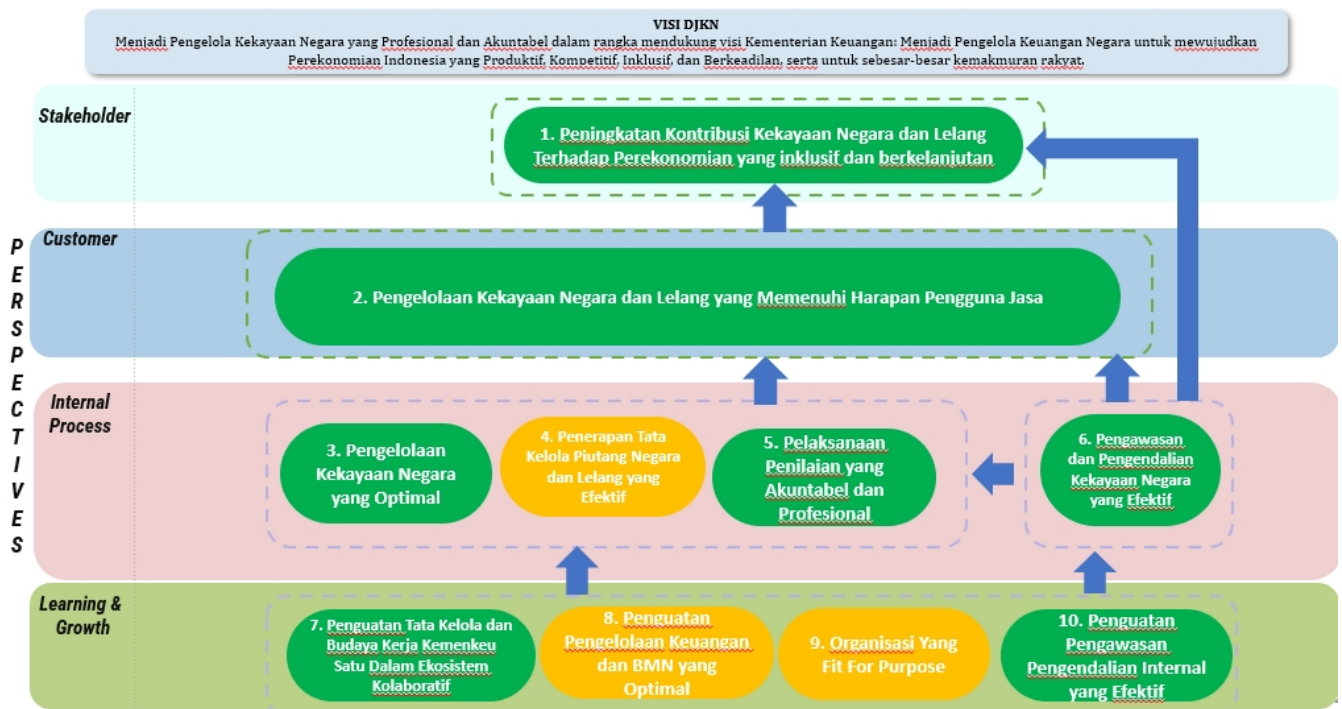






PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-03/WKN.08/2023  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG BOGOR  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
BOGOR  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1   | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan | 1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100    |
|     |   | 1b-CP Persentase Produktivitas Lelang  | 80     |
| 2   | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa                              | 2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang  | 100    |
|     |   | 2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara                                    | 100    |
| 3   | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal  | 3a-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan      | 68     |
|     |   | 3b-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan                   | 100    |
|     |   | 3c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)                         | 100    |
|     |   | 3d-CP Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)   | 100    |
| 4   | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif  | 4a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction                 | 94     |
|     |   | 4b-CP Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online                                    | 86     |
|     |   | 4c-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN   | 15     |
| 5   | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional  | 5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian  | 25     |
|     |   | 5b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien    | 70     |
| 6   | Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif  | 6a-CP Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara      | 86     |
| 7   | Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif                        | 7a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai  | 100    |
| 8   | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal   | 8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran                                       | 95,5   |



| No. | Sasaran Program/Kegiatan                                | Indikator Kinerja   | Target |
|-----|---|---|--------|
| 9   | Organisasi yang fit-for-purpose                         | 9a-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti | 97     |
|     |   | 9b-N Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM            | 100    |
| 1   | Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif | 10a-CP Indeks Integritas Organisasi                                     | 88,67  |
|     |   | 10b-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP                            | 100    |

### Program/ Kegiatan Tahun 2023

### Anggaran

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b> | <b>Rp 697.554.000</b>   |
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi                     | Rp 10.240.000           |
| 2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko          | Rp -                    |
| 3. Pengelolaan Aset   | Rp 687.314.000          |
| 4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara                      | -                       |
| 5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara    | -                       |
| 6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif            | Rp -                    |
| <b>Dukungan Manajemen</b>                                     | <b>Rp 2.626.050.000</b> |
| 1. Legislasi dan Litigasi                                     | Rp 58.468.000           |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum                        | Rp 2.524.946.000        |
| 3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik                | Rp 13.548.000           |
| 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal  | Rp 29.088.000           |

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan  
Negara Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tavianto Noegroho

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Bogor



Ditandatangani Secara Elektronik  
Bimo Aryo



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
BOGOR  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

| Kode SS/IKU | SS dan IKU  | Target |    |        |    |        |     |     |
|-------------|---|--------|----|--------|----|--------|-----|-----|
|             |   | Q1     | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4  | Y   |
| 1           | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan |        |    |        |    |        |     |     |
| 1a-CP       | Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang                      | 10     | 30 | 30     | 60 | 60     | 100 | 100 |
| 1b-CP       | Persentase Produktivitas Lelang   | 30     | 45 | 45     | 60 | 60     | 80  | 80  |
| 2           | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa                              |        |    |        |    |        |     |     |
| 2a-CP       | Persentase Realisasi Pokok Lelang   | 20     | 40 | 40     | 70 | 70     | 100 | 100 |
| 2b-CP       | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara   | 10     | 30 | 30     | 60 | 60     | 100 | 100 |
| 3           | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal  |        |    |        |    |        |     |     |
| 3a-CP       | Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan                           |        | 50 | 50     | 55 | 55     | 68  | 68  |
| 3b-CP       | Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan  |        | 40 | 40     | 60 | 60     | 100 | 100 |
| 3c-CP       | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)  | 10     | 30 | 30     | 60 | 60     | 100 | 100 |
| 3d-CP       | Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)  | 12     | 32 | 32     | 75 | 75     | 100 | 100 |
| 4           | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif  |        |    |        |    |        |     |     |
| 4a-CP       | Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction                                      | 94     | 94 | 94     | 94 | 94     | 94  | 94  |
| 4b-CP       | Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online   | 20     | 40 | 30     | 63 | 63     | 86  | 86  |
| 4c-CP       | Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN  | 15     | 15 | 15     | 15 | 15     | 15  | 15  |
| 5           | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional  |        |    |        |    |        |     |     |
| 5a-CP       | Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian   | 25     | 25 | 25     | 25 | 25     | 25  | 25  |



| Kode SS/IKU | SS dan IKU   | Target |      |        |      |        |       |       |
|-------------|--|--------|------|--------|------|--------|-------|-------|
|             |  | Q1     | Q2   | Smt. 1 | Q3   | s.d.Q3 | Q4    | Y     |
| 5b-CP       | Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien  | 70     | 70   | 70     | 70   | 70     | 70    | 70    |
| 6           | Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif                         |        |      |        |      |        |       |       |
| 6a-CP       | Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara    |        | 50   | 50     |      | 50     | 86    | 68    |
| 7           | Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif |        |      |        |      |        |       |       |
| 7a-N        | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai                                       | 15     | 40   | 40     | 75   | 75     | 100   | 100   |
| 8           | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal                              |        |      |        |      |        |       |       |
| 8a-CP       | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran                                     | 95,5   | 95,5 | 95,5   | 95,5 | 95,5   | 95,5  | 95,5  |
| 9           | Organisasi yang fit-for-purpose  |        |      |        |      |        |       |       |
| 9a-N        | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti               |        |      |        |      |        | 97    | 97    |
| 9b-N        | Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM                          |        |      |        |      |        | 100   | 100   |
| 10          | Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif                          |        |      |        |      |        |       |       |
| 10a-CP      | Indeks Integritas Organisasi   |        |      |        |      |        | 88,67 | 88,67 |
| 10b-CP      | Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP  |        |      |        |      |        | 100   | 100   |

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Bogor,



Diandatangani Secara Elektronik  
Bimo Aryo



**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | Output/Outcome | Trajectory |        | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|-----|-----|---------------------|----------------|------------|--------|---------------------|------------------|------------|
|     |     |                     |                | Kegiatan   | Output |                     |                  |            |
| 1   |     |                     |                |            |        |                     |                  |            |
|     |     |                     |                |            |        |                     |                  |            |

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Bogor



Ditandatangani Secara Elektronik  
Bimo Aryo



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

| PEGAWAI YANG DINILAI  |   | PEJABAT PENILAI KINERJA  |   |                  |
|-----------------------|---|--|---|------------------|
| NAMA                  | Bimo Aryo   | NAMA   | Tavianto Noegroho   |                  |
| NIP                   | 197602042002121002  | NIP  | 196507291991031002  |                  |
| PANGKAT/<br>GOL RUANG | Pembina, IV/a   | PANGKAT/<br>GOL RUANG  | Pembina Utama Madya, IV/d                                     |                  |
| JABATAN               | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor  | JABATAN  | Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat     |                  |
| UNIT KERJA            | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat   | UNIT KERJA   | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat |                  |
| NO                    | RENCANA HASIL KERJA   | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU   | TARGET  | PERSPEKTIF       |
| (1)                   | (2)   | (3)  | (4)   | (5)              |
| <b>A. UTAMA</b>       |   |  |   |                  |
| 1.                    | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat) (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat) | Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100   | Penerima Layanan |
| 2.                    | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat) (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal                             | Persentase Produktivitas Lelang  | 80  | Penerima Layanan |



|    |   |   |     |                  |
|----|---|---|-----|------------------|
|    | Kekayaan Negara Jawa Barat)   |   |     |                  |
| 3. | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat) | Persentase Realisasi Pokok Lelang   | 100 | Penerima Layanan |
| 4. | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat) | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara                               | 100 | Penerima Layanan |
| 5. | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)                                   | Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | 68  | Proses Bisnis    |
| 8. | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)                                   | Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan              | 100 | Proses Bisnis    |
| 9. | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)                                   | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)                    | 100 | Proses Bisnis    |



|     |   |  |     |               |
|-----|---|--|-----|---------------|
| 10. | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)                     | Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)                             | 100 | Proses Bisnis |
| 11. | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat) | Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction | 94  | Proses Bisnis |
| 12. | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat) | Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online                    | 86  | Proses Bisnis |
| 13. | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat) | Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN                                 | 15  | Proses Bisnis |
| 14. | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)         | Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian                                | 25  | Proses Bisnis |



|     |   |   |      |                                  |
|-----|---|---|------|----------------------------------|
| 15. | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)                             | Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien | 70   | Proses Bisnis                    |
| 16. | Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)                         | Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara   | 86   | Proses Bisnis                    |
| 17. | Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat) | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai                                      | 100  | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 18. | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)                              | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran                                    | 95,5 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 19. | Organisasi yang Fit For Purpose (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)  | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti              | 97   | Penguatan Internal atau Anggaran |



|     |  |   |       |                                  |
|-----|--|---|-------|----------------------------------|
| 20. | Organisasi yang Fit For Purpose (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)                         | Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100   | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 1.  | Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat) | Indeks Integritas Organisasi                            | 88,67 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 2.  | Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)<br>(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat) | Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP                   | 100   | Penguatan Internal atau Anggaran |

#### B. TAMBAHAN

#### PERILAKU KERJA

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Berorientasi pelayanan   |   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul> | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p> |
| 2 | Akuntabel  |   |



| PERILAKU KERJA |  |  |
|----------------|--|--|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>                                   | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>   |
| 3              | Kompeten   |  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>   | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p> |
| 4              | Harmonis   |  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>   | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>           |
| 5              | Loyal  |  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul> | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>   |
| 6              | Adaptif  |  |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> </ul>   | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>   |



| PERILAKU KERJA |   |   |
|----------------|---|---|
|                | - Bertindak proaktif  | Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.   |
| 7              | Kolaboratif   |   |
|                | - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi<br>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah<br>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama | Ekspektasi Khusus Pimpinan:<br><br>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban. |

31 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Bimo Aryo

197602042002121002

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Tavianto Noegroho

196507291991031002





LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

| DUKUNGAN SUMBER DAYA     |   |        |    |       |    |        |     |     |
|--------------------------|---|--------|----|-------|----|--------|-----|-----|
| 1.                       | 48 pegawai  |        |    |       |    |        |     |     |
| 2.                       | Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain. |        |    |       |    |        |     |     |
| SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN |   |        |    |       |    |        |     |     |
| 1.                       | Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan  |        |    |       |    |        |     |     |
| No                       | IKI   | Target |    |       |    |        |     |     |
|                          |   | Q1     | Q2 | Smt.1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4  | Y   |
| 1                        | Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang          | 10     | 30 | 30    | 60 | 60     | 100 | 100 |
| 2                        | Persentase Produktivitas Lelang   | 30     | 45 | 45    | 60 | 60     | 80  | 80  |
| 3                        | Persentase Realisasi Pokok Lelang   | 20     | 40 | 40    | 70 | 70     | 100 | 100 |
| 4                        | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara   | 10     | 30 | 30    | 60 | 60     | 100 | 100 |
| 5                        | Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan               |        | 50 | 50    | 55 | 55     | 68  | 68  |
| 6                        | Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan                            |        | 40 | 40    | 60 | 60     | 100 | 100 |
| 7                        | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)                                  | 10     | 30 | 30    | 60 | 60     | 100 | 100 |



|                    |   |      |      |      |      |      |       |       |
|--------------------|---|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 8                  | Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)  | 12   | 32   | 32   | 75   | 75   | 100   | 100   |
| 9                  | Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction                        | 94   | 94   | 94   | 94   | 94   | 94    | 94    |
| 10                 | Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online   | 20   | 40   | 40   | 63   | 63   | 86    | 86    |
| 11                 | Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN  | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15    | 15    |
| 12                 | Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25    | 25    |
| 13                 | Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien           | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70    | 70    |
| 14                 | Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara             |      | 50   | 50   |      |      | 86    | 86    |
| 15                 | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai  | 15   | 40   | 40   | 75   | 75   | 100   | 100   |
| 16                 | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran  | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5  | 95,5  |
| 17                 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti                        |      |      |      |      |      | 97    | 97    |
| 18                 | Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM                                   |      |      |      |      |      | 100   | 100   |
| 19                 | Indeks Integritas Organisasi  |      |      |      |      |      | 88,67 | 88,67 |
| 20                 | Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP   |      |      |      |      |      | 100   | 100   |
| <b>KONSEKUENSI</b> |   |      |      |      |      |      |       |       |
| 1.                 | Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku. |      |      |      |      |      |       |       |



|    |   |
|----|---|
| 2. | Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. |
|----|---|

31 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Bimo Aryo

197602042002121002



Ditandatangani secara elektronik

Tavianto Noegroho

196507291991031002

